



RENSTRA

RENCANA **tahun** STRATEGIS
2021-2026

DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas curahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Kota Makassar dapat diselesaikan sesuai harapan kita semua.

Dokumen Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Makassar ini disusun proses keterbukaan informasi sebagaimana harapan tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta dalam rangka memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Perdagangan Kota Makassar sesuai misi dan visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar dapat lebih terarah dan memiliki target-target tahunan yang jelas.

Tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan dengan sempurna, demikian halnya dengan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kami berharap dengan terasusunnya Dokumen Renstra ini dapat berguna bagi perbaikan dan penangkatan kinerja selama tahun 2021-2026.

Makassar, September 2021

Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Kota Makassar

ARLIN ARIESTA S.STP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19770411 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN	V
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3.1 MAKSUD	4
1.3.2 TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	8
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR	8
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR	8
2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS:	8
2.2 SUMBER DAYA SKPD	11
2.2.1 PEGAWAI	11
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA	12
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026	14
2.2.3 CAPAIAN KINERJA	14
2.3.1 REALISASI ANGGARAN	23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR	29
BAB III	34
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN	34
KOTA MAKASSAR	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR	34
3.1.1 SEKTOR PERDAGANGAN	35
3.1.2 SEKTOR SEKTOR PERINDUSTRIAN	36
3.2 TELAAHAN VIS, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	38
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L	42
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP SETRATEGIS	47
3.5 PENENTUAN ISU-ISU SETRATEGIS	48
BAB IV	50

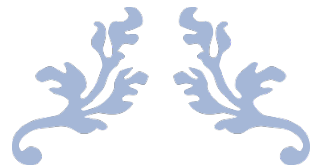
TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V	54
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	54
4.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD DINAS PERDAGANGAN KOTA TAHUN 2021-2026...	54
BAB VI.....	61
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026.....	61
BAB VII.....	101
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
BAB VIII	112
PENUTUP.....	112

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1 Data pegawai berdasarkan pendidikan	11
2	Tabel 2.2 Pegawai berdasarkan Eselon dan Jabatan	11
3	Tabel 2.3 Pelaksana	12
4	Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Makassar	13
5	Tabel. 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2014 - 2019.....	15
6	Tabel. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2014 - 2019	24
7	Tabel 3.1 Identifikasi Isu - isu Strategis(Lingkungan Eksternal).....	36
8	Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	37
9	Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	42
10	Tabel 3.3.1 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan RI.....	43
11	Tabel 3.3.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI.....	43
12	Tabel 3.3.3 Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi selatan	44
13	Tabel 3.3.4 Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan.....	46
14	Tabel 4.1 Tujuan Dan sasaran RPJMD 2021 - 2026.....	50
15	Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026	51
16	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran , Setrategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026.....	57
17	Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran , Setrategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026	58
18	Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026	62
19	Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Makassar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	101
20	Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 1- STRUKTUR ORGANISASI	10
---	----



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Desentralisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat telah memberikan dampak perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, baik itu berupa perubahan peran maupun fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu tentunya memerlukan pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas.

Pembangunan Kesejahteraan masyarakat dimaksudkan agar daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dan terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Makassar terutama di Sektor Perdagangan dan di sektor Industri . Sehingga Dinas Perdagangan Kota Makassar mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Makassar. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Makassar dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 sebagai bagian dari RPJMD dengan mengikut sertakan pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya sehingga hasilnya akan lebih efektif dan kondusif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai pedoman dan landasan bagi SKPD dalam melaksanakan program-programnya dan penyusunannya didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Kota Makassar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Propinsi yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Makassar, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar menyusun dokumen rencana strategis pembangunan pada bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

Dalam menyusun dokumen rencana strategis dimaksud tetap memperhatikan pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga terdapat adanya keterkaitan dengan dokumen perencanaan strategis SKPD lainnya, yang selanjutnya dapat mempermudah pelaksanaannya, khususnya pada bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian di Kota Makassar.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 ini digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam menetapkan skala prioritas yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis 2021 - 2026, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019;

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Rencana Lima Tahunan yang memberikan arah bagi Dinas Perdagangan Kota Makassar sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih dalam memberikan pelayanan di bidang Perdagangan dan di bidang Perindustri Kota Makassar secara komprehensif, terintegrasi dan harmonis antara berbagai komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara spesifik dokumen Rencana Strategis dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas Perdagangan Kota Makassar yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan kerangka regulatif dan kerangka pembiayaan yang bersifat indikatif.;
- b. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta mengukur capaian standar pelayanan minimal dan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja dinas dalam setiap tahunnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala Dinas dan seluruh jajaran staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian di Kota Makassar.
2. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun kemitraan antar *'stake holders'* untuk menentukan arah kebijakan dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian Kota Makassar Tahun 2021-2026.
3. Untuk menetapkan prioritas dan prasarana kegiatan secara terukur dengan strategi-strategi pencapaiannya dan menjadi alat penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahunan (2021 – 2026).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

- 2.1 Tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Makassar
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN,

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDAAAN

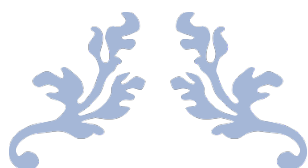
Pada bab vi akan memuat program, kegiatan serta pendanaan indikatif pertahun atau kumulatif selama kurun waktu lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026,

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab vii ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab Penutup akan memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting Renstra bagi Dinas Perdagangan Kota Makassar serta catatan dan harapan Kepala Dinas dimasa yang akan datang.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

2.1 Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas perdagangan kota makassar

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, sebagai implementasi dari RPJMD Kepala Daerah. Renstra-SKPD pada dasarnya merupakan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta kumpulan dari kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk periode lima tahun mendatang dengan membandingkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan juga standar pelayanan minimum yang akan dicapai.

Sebagai dokumen perencanaan 5 tahun, Rencana Strategis SKPD mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan SKPD untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sisi transparansi dalam sistem akuntabilitas pemerintah, Renstra SKPD merupakan acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Renstra SKPD dimaksud disiapkan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi dinas antara lain :

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, sebagaimana dimaksud, disusun dalam bentuk bagan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas:

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian

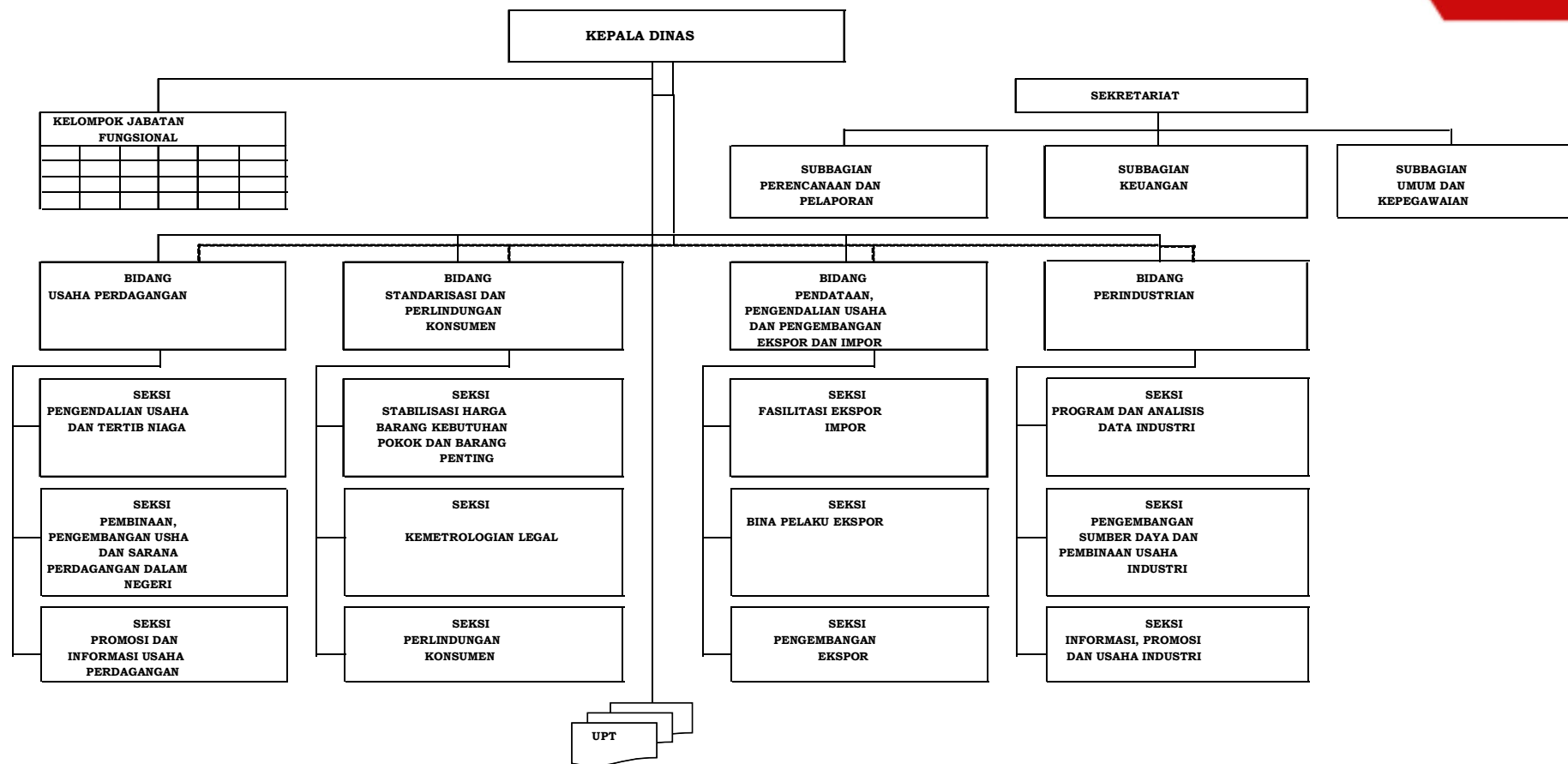
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan Kota Makassar Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perdagangan dan Perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Perdagangan Kota Makassar terbagi dalam unit kerja yang meliputi Sekretariat, Bidang- bidang dan UPT. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, disusun dalam bentuk bagan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagan 1- STRUKTUR ORGANISASI

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Pegawai

Dinas Perdagangan Kota Makassar memiliki pegawai 123 orang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 24 orang, dengan jenjang pendidikan Program (S2) 22 Orang, Program Sarjana 66 orang, Program Sarjana Muda 5 orang dan Program Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 30 orang.

1 Tabel 2.1 Data pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Status			Jumlah
		PNS	TKK	TKS / Magang	
1	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	20	2	-	22
2	Sarjana (S1)	39	25	2	66
3	Diploma III	2	3	-	5
4	SMU/Kejuruan	15	14	1	30
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
Jumlah		76	44	3	123

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021

Pegawai yang menduduki sebagai pelaksana berjumlah personil sebanyak 99 orang yang terdiri dari 52 orang PNS dengan jenjang pendidikan Program (S2) 6 orang, Program Sarjana 56 orang, Program Diploma III 4 orang, Program Sekolah Menengah Atas 26 orang, Program Sekolah Menengah Pertama 0 orang, kemudian 47 orang Tenaga Kerja Sukarela dengan jenjang pendidikan Program Sarjana 27 orang, Program Diploma III 3 Orang, Program Sekolah Menengah Atas 15 orang, Program Sekolah Menengah Pertama 0 orang yang didukung oleh sarana dan prasarana/inventaris kantor.

2 Tabel 2.2 Pegawai berdasarkan Eselon dan Jabatan

No	Eselon	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan	Jumlah
1.	II	Pembina Utama Muda	(IV/c)	S 2	1
2.	II	Pembina TK I	(IV/b)	S 2	-
3.	III	Pembina	(IV/a)	S 1	4
4.	III	Penata	(III/c)	SLTA	1
5.	IV	Pembina	(IV/a)	S 2	6

6.	IV	Penata Tk I	(III/d)	S 1	10
7.	IV	Penata	(III/c)	S 2	1
8.	IV	Penata	(III/c)	S	1
Total					24

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021

Tabel 2.3 Pelaksana

N o	Pangkat	Gol / Ruang	Pendidikan	Jumlah
1.	Pembina	(IV/a)	S 2	2
2.	Pembina	(IV/a)	S 1	1
3.	Penata Tk I	(III/d)	S 2	2
4.	Penata Tk I	(III/d)	S 1	1
5.	Penata	(III/c)	S 2	1
6.	Penata	(III/c)	S 1	6
7.	Penata Muda Tk I	(III/b)	S 2	1
8.	Penata Muda Tk I	(III/b)	S 1	5
9.	Penata Muda	(III/a)	S 1	11
10	Pengatur Tk I	(II/d)	D 3	1
1	Pengatur Tk I	(II/d)	S L T A	2
1	Pengatur	(II/c)	S L T A	2
Sub Total				35
Tenaga Honorer				
1.	Tenaga Kerja Sukarela	Strata Dua (S2)		2
		Strata Satu (S1)		27
		Diploma III (D III)		3
		SMA/Kejuruan		15
		SMP		-
Sub Total				47
Total				82

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Makassar tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kelancaran kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana pendukungnya baik secara kualitas maupun

kuantitas. Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021 dapat dilihat dalam table berikut ini :

14 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Makassar

No	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
A.	RUMAH TANGGA				
1	Sound System	Baik	--	--	3 Unit
2	Handycam	Baik	--	--	2 Unit
3	Printer Epson	Baik	--	--	22 Unit
4	Printer Brother MFC-T810w	Baik	--	--	5 Unit
5	Printer Leser Jet	Baik	--	--	11 Unit
6	UPS	Baik		--	6 Unit
7	Proyektor	Baik	--	--	3 Unit
8	Komputer / PC	Baik	--	--	39 Unit
9	Layar Proyektor	Baik	--	--	3 Unit
10	Stabilizer	Baik	--	--	6 Unit
11	Mesin Tik Manual	--	--	Rusak	6 Unit
12	Wereles	Baik	--	--	1 Unit
13	Note Book	Baik	--	--	15 Unit
14	Meja Kerja 1 Biro	Baik	--	--	7 Unit
15	Meja Kerja 1/2 Biro	Baik		--	14 Unit
16	Kursi Pimpinan	Baik	--	--	13 Unit
17	Kursi Kerja	Baik	--	--	31 Unit
18	Kursi Rapat / Lipat	Baik	--	--	111 Unit
19	Sofa	Baik	--	--	2 Unit
20	Sofa Kepala Dinas	Baik	--	--	1 Unit
21	Rak Arsip Gantung	Baik		--	26 Unit
22	Kamera Digital	Baik	--	--	2 Unit
23	Mesin Penghancur Kertas	Baik		--	1 Unit
24	AC	Baik	--	--	25 Unit
25	Kipas Angin / Fan	Baik	--	--	1 Unit
26	Brankas	Baik	--	--	1 Unit
27	Filling Cabinet	Baik	--	--	9 Unit
28	White Board 90x120cm	Baik	--	--	1 Unit
29	Dispenser	Baik	--	--	6 Unit
30	Kulkas 1 Pintu		--	--	2 Unit

No	Nama Barang	Keadaan Barang			Nama Barang
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
31	Meja Eksekutif Kadis	Baik	--	--	1 Unit
32	Meja Rapat Kadis	Baik	--		1 Unit
33	Scanner	Baik		--	1 Unit
34	CCTV	Baik	--	--	3 Unit
35	Meja Rapat	Baik	--	--	6 Unit
36	Server	Baik	--	--	1 Unit
37	Lemari Arsip besi 2 Pintu	Baik	--	--	29Unit
38	Lemari Arsip Kaca 2 Pintu	Baik	--	--	16 Unit
39	Papan Struktur Organisasi	Baik	--	--	1 Buah
40	Papan Nama Dinas	Baik	--	--	2 Buah
41	LCD TV 43 inci	Baik	--	--	3 Unit
42	Bejana Ukur	Baik		--	24 Unit
43	Pompa Air	Baik	--	--	3 Unit
44	Genset	Baik	--	--	5 Unit
45	Freezer	Baik	--	--	5 Unit
46	Mesin Tik Listrik	Baik	--	--	2 Unit
47	Anak Timbangan Milligram	Baik	--	--	39 Unit
48	Alat Ukur Lainnya	Baik	--	--	9 Unit
49	Mesin UPTD Kulit	9	4		13 Unit

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026

2.2.3 Capaian Kinerja

Sebagai SKPD yang melaksanakan **Urusan Perdagangan dan perindustrian** di Kota Makassar, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2014-2019 dan proyeksi capaian target Tahun 2021 berdasarkan alokasi anggaran program di Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5 Tabel. 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2014 – 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Perdagangan Dalam Negeri		9750314286000		9007783255000	9187938921000	9371697699000	9559131653000	9750314286000	9638328082850	9321983534289	9321983534289	9559131653000	8.540.134.981.571	107%	95,61%	99,47%	100%	87,59%
2	Jumlah Pedagang Kaki Lima yang tertata		1500		500	500	500	800	-	350	500	500	800	-	70	100	100	100	
3	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang terbina dan tertata		87,36		-	-	-	57,76	7,36	-	-	-	61,0 %	87,36	-	-	-	105,61	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
4	Meningkatnya Volume dan Nilai Ekspor		21		7%	7%	7%	-	-	2%	4%	4%			29%	57,14%	57,14%	-	-
5	Volume dan Nilai Ekspor		132.641.192 ton				542704683,55	481.191,52 ton					132160,00	384720,00				28,84%	79,95%
			656.074,684 \$				542704683,55	542704683,55					113.370.000,00	542.704.683,55				0,219343	100,00%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
6	Presentase penyelesaian masalah konsumen dengan pelaku usaha		15 %			5%	5%	5%	-	-	17	13	84,62	-	-	340	260	1692	-	-
7	Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dibina dan dikendalikan		50%			-	-	-	40%	50%	-	-	-	40%	50%	-	-	-	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
8	Cakupan pelayanan perdagangan dan perindustrian yang diselesaikan		70%					60%	70%	-	-	-	60%	70	-	-	-	100%	100%
9	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)		350000000000		148.831.494.000	151.808.531.000	154.844.701.000	300.000.000.000	350.000.000.000	159.537.406.406	151.808.531.000	154.844.702.000	309.659.879.980	586.031.002.000	107,19%	43,37%	100,00%	103,22%	167,44%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
10	Jumlah wirausaha / tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi		2.630			290	290	300	750	1000	290	600	290	750	800	100%	206,90%	270,50%	100%	80%
11	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor		90 %		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
13	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya		100 psg		100 psg	100 psg	100 psg	100 psg	100 psg	115	100	115	116	130	115%	100%	115%	116%	130%
14	Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD		85%		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Penjelasan pencapaian target kinerja sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019 sebagaimana tersebut di atas adalah berikut :

1. Nilai Perdagangan Dalam Negeri

Nilai perdagangan dalam negeri di targetkan di akhir periode RPJMD 2014-2019 adalah sebesar Rp. 9.750.314.286.000 adapun realisasi di akhir periode RPJM sebesar Rp. 8.540.134.981.571 atau 87,59 % dari target. Meskipun demikian pada tahun 2015 Nilai perdagangan dalam negeri terealisasi sebesar Rp. 9638328082850, tahun 2016 Rp. 9321983534289, tahun 2017 Rp. 9321983534289 dan tahun 2018 Rp. 9559131653000, dengan rata-rata capaian 97,93 %.

2. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang tertata

Jumlah pedagang kaki lima yang tertata dengan target akhir periode RPJMD 2014-2019 adalah 1500 PKL yang tertata dengan realisasi sampai tahun 2017 sebanyak 1350 dan pada tahun 2018 sebanyak 800 PKL melebihi dari target RPJMD. Untuk indikator ini pada Tahun 2018 -2019 dilakukan perubahan indikator yang berupa Outcome dimana pada indikator ini masih berbentuk output dipandng tidak bisa menjadi indikator program.

3. Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang terbina dan tertata

Cakupan pembinaan pedagang kaki lima yang terbina dan tertata indikator ini merupakan perubahan dari indikator jumlah pedagang kaki lima yang tertata, dimana target pada indikator ini samapai akhir periode sebesar 87,36 % dari seluruh jumlah PKL yang ada di Kota Makassar, dengan realisasi ada tahun 2018 realisasi 61,0 % dan tahu 2019 sebesar 87,36 %. Dengan rata-rata capaian 100 %.

4. Meningkatnya Volume dan Nilai Ekspor

Untuk indikator meningkatnya volume dan nilai ekspor target sampai dengan periode RPJMD adalah 21 % dengan relaisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 10% dimana tahun 2015 2 % kemudian tahun 2016 4 % dan 2017 4 % dengan rata-rata capaian 47,76 %, dimana pada tahun 2018 dan 2019 indikator kinerja berubah menjadi Voluem Ekspor dan nilai Ekspor.

5. Volume dan Nilai Ekspor

Indikator Volume dan nilai ekspor dengan target 132.641.192 ton dan 656.074.684 \$ di akhir periode dengan capaian masing-masing untuk volume ekspor target tahun 2018 adalah 542704683,55 ton dengan capaian 132160,00 ton atau 28,84 % pada tahun 2019 target 481.191,52 ton dengan relaisasi 384720,00 ton atau 79,95 % dengan rata-rata capaian 54,39 %. Untuk Nilai ekspor target di akhir perode adalah sebesar 656.074.684 \$ dengan target dan realisasi pertahunnya adalah Tahun 2018 542.704.683,55 \$ dengan realisasi 113.370.000 \$ dengan capaian 0,219 % dan tahun 2019 target 542.704.683,55 \$ dengan realisasi Rp.542.704.683.55 atau 100 % dengan rata-rata capaian 60,97%.

6. Presentase penyelesaian masalah konsumen dengan pelaku usaha

Presentase penyelesaian masalah konsumen dengan pelaku usaha di targetkan 15 % dengan target pertahunnya sampai dengan tahun 2017 7% pertahun dengan realisasi pada tahun 2015 17 % tahun 2016 13 % dan tahun 2017 84,62 % dengan rasio capaian tahun 2015 340 % tahun 2016 260%, tahun 2017 1692 %. Dengan rata-rata capaian 764,13 %. Untuk indikator mengalami perubahan di tahun 2018 untuk dilakukan penyesuaian indikator pada perubahan Renstra.

7. Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dibina dan dikendalikan

Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dibina dan dikendalikan dengan target 50 % di akhir periode renstra. Dengan target pertahun yaitu tahun 2018 40 % dan tahun 2019 50 % dengan realisasi pada tahun 2018 40 % dan tahun 2019 50 % . rasio capaian pada indikator ini adalah 100 % dengan rata-rata capaian 100 %.

8. Cakupan pelanggaran perdagangan dan perindustrian yang diselesaikan

Cakupan pelanggaran perdagangan dan perindustrian yang diselesaikan, indikator ini masuk di Renstra Perubahan yaitu mulai tahun 2018, sehingga target pada indikator ini hanya dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk targetnya sampai akhir periode Renstra adalah 70 % sedangkan pertahunnya adalah tahun 2018 adalah 60 % dan tahun 2019 70 % dengan realisasi pertahunnya adalah 60 % pada tahun 2018 dan 70 % pada tahun 2019 dengan rata-rata capaian 100 %.

9. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan Target sampai akhir tahun periode adalah 350.000.000.000 dengan target dan realisasi pertahun adalah tahun 2015 148.831.494.000 dengan realisasi 159.537.406.406 atau 107,19 %, Tahun 2016 target 151.808.531.000 dengan realisasi 151.808.531.000 atau 43,37 %, tahun 2017 Target 154.844.701.000 dengan realisasi 154.844.702.000 atau 100 %, tahun 2018 target 300.000.000.000 dengan realisasi 309.659.879.980, tahun 2019 target 350.000.000.000 dengan realisasi 586.031.002.000 atau 167,44 %. Dengan rasio capaian 104,24 %.

10. Jumlah wirausaha / tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Jumlah wirausaha / tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi dengan target di akhir periode renstra 2.630 dengan target dan realisasi pertahunnya adalah tahun 2015 target 290 orang dengan realisasi 290 orang, Tahun 2016 Target 290 orang dengan Realisasi 600 Orang, Tahun 2017 target 300 Orang dengan realisasi 290 Orang Tahun 2018 Target 750 Orang dengan realisasi 750 Orang sedangkan di tahun 2019 target 1000 Orang dengan realisasi 800 Orang dengan tingkat capaian 116,71 %.

11. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target di akhir periode RENSTRA adalah 100 % dan target pertahunnya 100 % dengan rata-rata capaian dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 100 %.

12. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor dengan target di akhir periode Resntra adalah 90 % dan Target Pertahun mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah 90 % dengan realisasi 90 % pertahun. Dan rasio caain kinerja adalah 100 %.

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya dengan target di akhir periode Resntra adalah 100 pasang dan Target Pertahun mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah 100 pasang dengan realisasi tahun 2015 115 pasang, tahun 2016 100 pasang, tahun 2017 115 pasang, tahun 2018 116 pasang dan tahun 2019 130 pasang. Dan rasio capain kinerja adalah 115,20 %.

13. Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD

Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD dengan target di akhir periode Resntra adalah 85 % dan Target Pertahun mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah 85 % dengan realisasi 85 % pertahun. Dan rasio caain kinerja adalah 100 %.

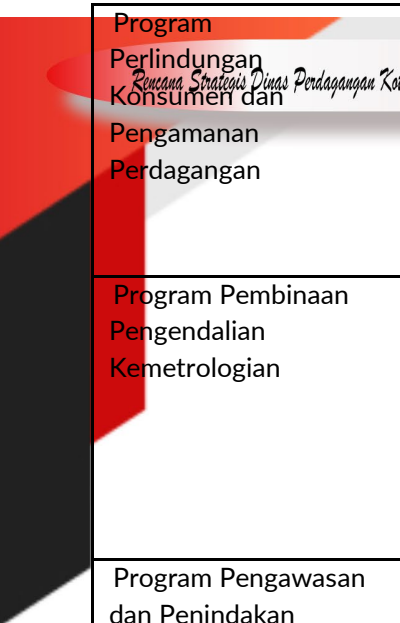
2.3.1 Realisasi Anggaran



Dinas Perdagangan Kota Makassar pada Tahun 2014 - 2019 melaksanakan 11 program dan 154 kegiatan, dengan pagu anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2014 - 2019

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.959.927.000	2.912.392.500	2.611.639.500	1.199.461.800	2.571.699.900	1.034.271.750	1.938.192.200	2.529.518.150	1.471.422.800	2.191.881.100	34,94%	66,55%	96,86%	96,26%	85,23%	4,87	(6,63)
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	237.377.000	705.612.500	1.200.000.000	665.030.350	366.055.000	212.298.450	574.405.000	1.172.340.950	649.821.600	360.338.650	89,44%	81,41%	97,70%	97,71%	98,44%	44,45	11,68
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	206.652.000	706.319.500	393.513.500	344.020.750	394.686.900	200.022.800	625.603.300	384.877.600	339.917.300	352.230.490	96,79%	88,57%	97,81%	98,81%	89,24	49,91	1,06

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	22,06	(40,06)	65,56	8,91
	28,11	114,02	(65,06)	53,79
	-	61,85%	96,56%	75,96%
	-	94,51%	97,98%	57,16%
	88,48%	-	-	89,95%
	34,11%	-	-	96,70%
	93,98%	-	-	96,80%
		1.125.945.350	614.412.050	1.291.033.846
		803.892.400	1.784.218.050	2.204.018.020
		-	-	3.198.369.168
		-	-	981.526.400
	526.824.650	-	-	874.681.550
	646.703.663	-	-	
		1.820.371.800	636.274.550	1.699.622.550
		850.553.900	1.821.018.700	3.855.940.200
	490.642.400	-	-	3.555.864.800
	1.544.481.000	-	-	1.015.066.600
	638.096.000	-	-	903.568.100



74,41	(7,32)	18,45	(3,71)	9,23
(2,24)	24,15	(7,99)	3,81	(4,56)
93,10%	86,41%	80,07%	99,62%	90,79%
65,05%	82,52%	91,96%	99,60%	86,22%
89,74%	88,59%	92,56%	92,83%	98,28%
83,76%	78,14%	66,66%	99,00%	68,24%
97,47%	84,26%	91,50%	98,00%	84,32%
2.754.586.590	1.714.569.801	813.191.450	66.250.000	315.362.150
 1.908.865.422	2.591.246.087	951.836.410	59.260.000	452.328.100
 3.789.420.895	2.079.903.168	913.067.700	53.375.000	497.699.250
1.758.423.342	1.744.660.233	742.911.260	56.925.000	347.360.700
6.943.971.719	967.258.548	1.333.242.100	56.350.000	394.856.450
2.958.701.300	1.984.203.850	1.015.628.200	66.500.000	367.200.000
2.928.459.100	3.140.030.350	1.035.094.500	59.500.000	524.600.000
3.888.514.100	2.347.711.950	986.502.750	57.500.000	506.400.000
2.099.311.400	2.232.593.864	1.114.433.000	57.500.000	509.000.000
124.284.000	1.147.911.000	1.457.100.900	57.500.000	468.260.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

sumber : Dinas Perdagangan Kota Makassar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perdagangan dan perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar kurun waktu 2014-2019 dapat dijelaskan melalui capaian program sebagai berikut:

1) Program Non-Urusan Setiap SKPD

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat menunjang pelaksanaan urusan SKPD. Pada dinas perdagangan terdapat 4 Program penunjang yaitu Program pelayanan Administrasi perkantoran dengan Total Anggaran selama lima Tahun sebesar Rp. 10.852.451.014 dengan realisasi Rp. 9.097.637.837 atau 83,83 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Total Anggaran selama lima tahun adalah Rp. 5.608.759.350 dengan realisasi sebesar Rp. 4.754.248.920 atau 84,76 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Anggaran selama lima tahun Rp. 298.500.000 dengan realisasi Rp. 292.160.000 atau 97,88 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan anggaran selama 5 tahun sebesar Rp. 2.375.460.000 dengan realisasi Rp. 2.007.606.650 atau 84,51 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada peningkatan nilai perdagangan dalam negeri yang dilakukan melalui pengembangan data potensi unggulan perdagangan, pengawasan pergudangan, pengawasan Wajib Daftar Usaha, Pengawasan Barang Berbahaya (B2), Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan waralaba, Pembinaan dan pengawasan produk telematika dan elektronika, Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, Pasar Murah, Monitoring informasi harga kebutuhan pokok, Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK) dan Penyusunan Detaling Engineering Design Pasar Tradisional dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 12.523.288.050,- dengan realisasi fisik mencapai (97,93%) dan realisasi keuangan mencapai Rp.9.106.533.000,- (72.72 %)

3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini diarahkan pada Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, di antaranya melalui pelaksanaan pendataan, pembinaan dan penataan PKL dan asongan sebanyak 500 kelompok yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 3.174.064.850,- dengan realisasi fisik mencapai (75,83%) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.174.064.850 ,- (100.00 %)

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada pengembangan komoditas dan peningkatan nilai ekspor, di antaranya melalui pelaksanaan

Pembuatan Profil Usaha Kecil, Menengah dan Besar, City Expo dan Temu Usaha Kemitraan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 2.045.192.650,- dengan realisasi fisik mencapai (60.97%) dan realisasi keuangan mencapai Rp.1.902.651.490,- (93.03 %)

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini diarahkan pada perlindungan hak-hak konsumen, di antaranya melalui pelaksanaan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pemantauan dan pengendali inflasi, Informasi Publikasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan klausula baku pelaku usaha, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, Pengawasan alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya, Pengadaan UTTP Standar, dan Sosialisasi UPTD Tera dan tera Ulang dengan alokasi anggaran Rp. 2.723.219.400,- dengan realisasi fisik mencapai (764,13 %) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.607.643.863,- (59.03 %)

6) Program Pembinaan Pengendalian Kemetrolgian

Program ini diarahkan pada perlindungan konsumen melalui pembinaan kemetrolgian, di antaranya melalui pelaksanaan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pemantauan dan pengendali inflasi, Informasi Publikasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan klausula baku pelaku usaha, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, Pengawasan alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya, Pengadaan UTTP Standar, dan Sosialisasi UPTD Tera dan tera Ulang dengan alokasi anggaran Rp. 2.670.925.700,- dengan realisasi fisik mencapai (40 %) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.929.837.750 ,- (72.25 %)

7) Program Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian

Program ini diarahkan pada pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan terkait dengan perdagangan dan perindustrian, di antaranya melalui pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pelanggaran Perdagangan, Sosialisasi Regulasi Pelanggaran Perindustrian, Operasional Penindakan Pelanggaran Perdagangan, Operasional Penindakan Pelanggaran Perindustrian, Penyusunan Regulasi Hukum Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian, Sosialisasi Penerapan Barang Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pelaku Usaha dengan alokasi anggaran Rp. 2.457.293.250,- dengan realisasi fisik mencapai (100%) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.398.630.100,- (97.61 %)

8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini diarahkan pada perencanaan, pengembangan dan pembangunan Industri, di antaranya melalui pelaksanaan Pameran

Teknologi Tepat Guna (TTG), Pameran Dekranasda, Pameran/Promosi Industri Kecil dan Menengah, Monitoring dan Evaluasi IKM, Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK), Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Makassar, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit dengan alokasi anggaran Rp. 11.030.062.250,- dengan realisasi fisik mencapai (100 %) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.549.628.984 ,- (78.51 %)

9) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia serta pengembangan kualitas produk di antaranya melalui pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga, Pembinaan Pengrajin Home Industri Kelurahan, Pengadaan Peralatan Mesin Penyamakan Kulit, Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengrajin Kulit, Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengrajin Perak, Pembinaan Industri Tenun dengan alokasi anggaran Rp. 18.999.269.900,- dengan realisasi fisik mencapai (116 %) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 16.851.267.968 ,- (89.69 %)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat kearah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai tallo yang bermuara dibagian utara kota dan sungai jeneberang yang bermuara diselatan kota. Luas wilayah Kota Makassar sebesar 175,77 Ha. Daratan dan termasuk 11 pulau diselat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km persegi.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada 7 (Tujuh) kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Kecmatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas batas administrasi Kota Makassar adalah :

Batas Utara : Kabupaten Maros

Batas Timur : Kabupaten Maros

Batas Selatan : Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar

Batas Barat : Selat Makassar

Sebagai Kota yang Sebagian besar Wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, membentang dari tepi pantai sebelah barat

dan melebar hingga ke arah timur sejauh kurang lebih 20 KM dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota Makassar yang termasuk dalam jalur jalur pengembangan wilayah, pertokoan, perkantoran, Pendidikan dan pusat kegiatan industri di Kota Makassar. Dari 2 sungai besar yang mengalir didalam kota secara umum kondisinya belum banyak dimanfaatkan, seperti menjadikan sebagai jalur alternatif baru bagi transportasi

Perkembangan jumlah penduduk yang cepat serta melimpahnya berbagai kegiatan perdagangan, industri dan jasa mengakibatkan banyaknya pergeseran lahan, yaitu beralihnya lahan pertanian menjadi kawasan perdagangan, industri dan pemukiman. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kota Makassar saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan jalan, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan, perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, perikanan (tambak), dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun yang meliputi penggunaan untuk perumahan, perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan perdagangan, serta jasa. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Potensi Kota Makassar diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya lahan kawasan dan zona industri, perdagangan, pergudangan serta infrastruktur yang telah memadai.
2. Adanya Bandara Internasional dan 2 Pelabuhan yang mendukung kegiatan ekspor / import.
3. Aspek market yang potensial, jumlah populasi (tenaga kerja) yang mendukung dan pertumbuhannya yang terus meningkat.
4. Aspek infra struktur sarana dan prasarana yang telah tersedia.
5. Aspek Informasi dan Teknologi yang terus meningkat
6. Potensi kewirausahaan yang perlu ditumbuh kembangkan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan kendala dan penghambat pembangunan perekonomian di Kota Makassar. Kondisi seperti ini pada gilirannya pasti akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, namun Kota Makassar mempunyai kekuatan

yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan yaitu memiliki daya dukung wilayah yang baik untuk pengembangan berbagai kegiatan sosial ekonomi terutama potensi Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah yang belum tergarap dengan baik, kemudian letaknya yang strategis sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi selatan

Penguatan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian diupayakan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada melalui peningkatan kegiatan investasi, mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas dan memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Orientasi kebijakan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi saja namun harus di kompensasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus mempunyai dampak yang luas pada pelaku usaha dalam peningkatan daya jual produk, memiliki daya saing produk dan mampu mengembangkan dan menumbuhkan usaha baru. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga harus mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar dalam hal peningkatan daya beli, adanya lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

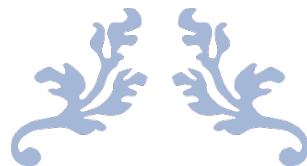
Tantangan dalam Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor memiliki beberapa tantangan. Hal ini dialami baik sebelum covid 19 maupun setelah covid 19 diantaranya yaitu :

- a. Adanya penerapan proteksionisme global sebagai strategi perdagangan berbagai negara sehingga sangat berdampak terhadap para pelaku usaha ekspor dan impor
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha ekspor sehingga sangat menyulitkan bersaing dengan pelaku usaha ekspor dan impor di negara lain
- c. Negara kita masih bertumpu pada produk ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah yang rendah
- d. Masih rendahnya keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan FTA (Free Trade Agreement)/Perjanjian Perdagangan Bebas

Terkait mengenai tantangan tersebut, maka Dinas Perdagangan menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha ekspor di Kota Makassar agar dapat bersaing dengan negara lain. Peluang tersebut sebagaimana di bawah ini :

- a. Melakukan negosiasi dengan mitra dagang di berbagai negara dengan harapan proteksionisme yang dilakukan berangsur-angsur dapat dibuka, sehingga peluang ekspor dan impor dapat terbuka lebar. Hal ini tentunya dilakukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan Propinsi Sulsel dan Kementerian Perdagangan RI

- b. Melakukan pembinaan terhadap para pelaku ekspor dan impor di Kota Makassar, baik pembinaan terhadap SDM maupun terhadap kualitas produk barang dan jasa.
- c. Mencari sumber - sumber energi baru dan terbarukan sebagai bahan utama dalam lebih meningkatkan kualitas produk ekspor
- d. Meningkatkan keterlibatan para pelaku usaha kecil / UMKM yang berpotensi ekspor dalam memanfaatkan FTA



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Rencana Strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah" Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
2. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
3. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4)

Sistematika penyusunan Renstra - SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang diatur pada pasal 40 ayat (4) paling

sedikit mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran umum pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar;
4. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan
6. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
7. Penutup.
8. Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.
9. Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perdagangan Kota Makassar berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- 10.** Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Makassar mempunyai tantangan pembinaan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian selama periode 2021-2026 secara umum meliputi: **meningkatkan penguatan sumberdaya aparatur dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian guna terciptanya iklim ekonomi kerakyatan yang dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat, tersedianya data dan informasi tentang perdagangan dan perindustrian.**

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar antara lain:

3.1.1 Sektor Perdagangan

- a. Masih tingginya nilai impor barang antar daerah;

- b. Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok dan upaya menjaga ketersediaannya;
- c. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha;
- d. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional;
- e. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal;
- f. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;
- g. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- h. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri;
- i. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran;
- j. Rendahnya nilai ekspor industri dan perdagangan;
- k. Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah
- l. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya;
- m. Belum optimalnya pelayanan tera dan tera ulang serta uji petik;
- n. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.

3.1.2 Sektor Sektor Perindustrian

- o. Rendahnya cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil;
- p. Masih rendahnya kualitas produk IKM yang dihasilkan;
- q. Terbatasnya kemampuan pelaku industri kecil dan menengah dalam mengakses dan memanfaatkan peluang pasar;
- r. Terbatasnya daya saing produk IKM;
- s. Masih terbatasnya kewenangan dalam upaya menangani gelojak harga dan ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku produk industri kecil dan menengah;
- t. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku industri dengan pelaku industri lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
- u. Belum optimalnya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah.

Tabel 3.1 Identifikasi Isu - isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Identifikasi Isu - isu Trategis (Lingkungan Eksternal)			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain - lain
Pemulihan Ekonomi Dunia Pasca Covid 19	Terselenggaranya Pameran berbasis sumber daya baru dan terbarukan di tingkat nasional	Fasililitasi pelaku usaha UMKM yang berpotensi ekspor	
Persaingan Global		Pembinaan yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas	
Pasar Bebas			

	Tersedianya pelaku usaha UMKM yang berpotensi ekspor	SDM pelaku usaha UMKM potensi ekspor Pemanfaatan teknologi yang terbaru	
--	--	--	--

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Visi : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk Semua “.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas Dunia Bersih dari indikasi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian ➤ Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah ➤ Menurunnya daya beli masyarakat ➤ Belum optimalnya daya dukung anggaran ➤ Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitas dan pembinaan perdagangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya sosialisasi ✓ Terbatasnya SDM ✓ Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha ✓ Lemahnya dunia usaha ✓ Terbatasnya anggaran ✓ Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran yang relatif kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya peraturan yang mendukung ✓ Peningkatan kesadaran hukum ✓ Peningkatan kemitraan usaha ✓ Peningkatan alokasi anggaran ✓ Penentuan Program Prioritas ✓ komitmen dalam pengembangan perdagangan dan perindustrian

2	Rekonstruksi Kesehatan'eko nomi,sosial dan budaya menjumMasyarakat Sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan yang kuat untuk semua	perindustrian ➤ Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar	✓ Belum dimilikinya data seluruh potensi perdagangan dan perindustrian secara <i>up to date</i> ✓ Banyaknya spekulasi harga	✓ Dukungan BUMN, perbankan dan pengusaha besar yang terdapat di Kota Makassar ✓ tingginya jumlah dan aktifitas komunitas kreatif di Kota Makassar ✓ Operasi pasar murah barang kebutuhan pokok ✓ ? sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain
---	--	--	--	---

3.2 Telaahan Vis, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kota Makassar yang tercantum dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021- 2026 yaitu :

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk Semua “.

Adapun misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 yaitu:

MISI 1

Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas Dunia Bersih dari indikasi korupsi :

1. Revolusi Pendidikan semua Harus Sekolah
2. Perkuat keimanan Ummat
3. 1000 beasiswa anak LORONG
4. 10.000 skill training gratis
5. Percepatan tata pemerintahan “sombere dan Smart bersih dari indikasi korupsi
6. Menuju PAD Rp 2 Trilyun
7. Menuju insentif kinerja RT/RW Rp 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan Penasehat Walikota serta Para local
8. Kelurahan Menjadi pusat pelayanan Publik yang “sombere dan Smart”

MISI 2

Rekonstruksi Kesehatan ekonomi, sosial dan budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan yang kuat untuk semua

1. Gerakan masyarakat perkuatan imunitas Kesehatan dan ekonomi
2. Perkuatan Fasilitas perlindungan dan pelayanan Kesehatan masyarakat
3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru
4. Penataan total system BUMD dan pembentukan Makassar incorporation
5. Pembuatan Perda OMNIBUS “Makassar Kota Dunia”
6. Percepatan program jagai ana’ta dan program Smart millenia serta sosial mitigation.
7. Penataan total Destinasi budaya dan sejarah.
8. Penguatan city Branding dan peningkatan Festival dan Mice Bulanan dalam Skala Nasional dan Internasional

MISI 3

Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju Kota Nyaman kelas Dunia “Somere dan Smart” City untuk semua.

1. Penataan Total system persampahan.
2. Pembenahan Total system penanganan Banjir dan pencegahan kemacetan.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan “Waterfront city berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan
4. Peningkatan jejaring Smart pendistrihan dan koridor Hijau Kota.
5. Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5.000 lorong wisata.
6. Percepatan pembangunan system dan infrastruktur “Sombere & Smart City” Yang Inklusif.
7. Percepatan Makassar Menjadi leviabile City dan Resilient City.
8. Pembangunan Gedung “ Sombere & Smart ” New DPRD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar yang berkaitan dengan Misi walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar adalah pada misi 1,2 dan 3 yaitu :

Pada Misi 1

- a. Program 10.000 skill training gratis,
 1. Kegiatannya Pemetaan Kebutuhan Skill Training, Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :
 - Fasilitasi pengelolaan sarana Distribusi perdagangan
 - Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi

perdagangan

2. Kegiatannya Pelatihan Peningkatan keterampilan usaha Lorong/star up, Terakomodir kedalam kegiatan Dinas perdagangan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu:

- koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta Masyarakat.

- b. Program Menuju PAD Rp 2 Trilyun,

1. Kegiatannya Kajian Peningkatan Sumber PAD Baru,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Fasilitasi penertiban surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang.

2. Kegiatannya Penerapan Retribusi/pajak berbasis IT,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Fasilitasi penertiban surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Pada Misi 2

- a. Program Gerakan Masyarakat perkuat imunitas Kesehatan dan ekonomi,

1. Kegiatannya Pembuatan Big data Kesehatan dan ekonomi Masyarakat,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.
- Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten /Kota.
- Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan.
- Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota.
- Pembinaan Pelaku Ekspor.

2. Kegiatannya Pengembangan UMKM Masyarakat Lorong,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Pemasaran dan peningkatan produk dalam Negeri di tingkat Kota
- Pelaksanan promosi penggunaan produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- b. Program Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang

bisnis baru,

1. Kegiatannya Pemetaan potensi dan jenis usaha Lorong,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industry dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota.
- Pemasaran dan peningkatan produk Dalam Negeri di tingkat Kota.
- Pelaksanaan promosi penggunaan produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kegiatannya Fasilitasi izin Berusaha UMKM,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam System Informasi industry Nasional (SINAS) yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan.
- Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri.

3. Kegiatannya pengembangan Ekonomi Kreatif/Star Up,

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Pelaksanaan promosi penggunaan produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten /Kota

Pada Misi 3

a. Program Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata,

1. Kegiatannya Pengembangan kegiatan ekonomi Lorong yang berbasis green,kuliner,dan kerajinan.

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta Masyarakat.

2. Kegiatannya Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi Lorong berdasarkan potensi yang dimiliki.

Terakomodir kedalam kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk Semua “.				
No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program 10.000 skill training gratis	Kurangnya SDM yang memadai bidang industri dan tidak bersertifikasi	Kurangnya Lembaga sertifikasi profesi sesuai kebutuhan industri di Kota Makassar	Jumlah SDM yang butuh ketrampilan yang bersertifikasi
2.	Program Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru,	Ketersediaan peluang bisnis baru yang kurang	Kurangnya data base peluang usaha yang potensial	Pertumbuhan usaha informal yang terus berkembang
3.	Program Menuju PAD Rp 2 Trilyun	PAD sector industri dan perdagangan yang masih rendah	Regulasi dalam upaya peningkatan PAD yang belum ada	Intesifikasi sumber PAD yang Ada
4.	Program Gerakan Masyarakat perkuat imunitas Kesehatan dan ekonomi	Kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat Pandemic	Aksesibilitas permodalan yang kurang	Mudahnya perizinan usaha baru melalui aplikasi OSS berbasis resiko
5.	Program Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata	Belum terbinanya Lorong yang berpotensi sebagai Lorong wisata daban Lorong garden	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lorongnya.	Data base Lorong binaan yang memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L

Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kota dan telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun renstra dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Propinsi. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan RI

Visi Kementerian Perdagangan : “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok. 3. Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab 4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri 5. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional 7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan promosi diversifikasi dan daya saing produk - Banyaknya jenis barang/jasa yang harus diawasi - Banyaknya pertumbuhan usaha sektor perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - keterbatasan anggaran - Keterbatasan sumber daya manusia - Keterbatasan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi produk unggulan Kota Makassar - Fasilitas promosi dari Kementrian - Potensi usaha perdagangan

Tabel 3.3.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI

Visi Kementerian Perindustrian : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan Persebaran Industri 7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan efisien. 10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan promosi dan daya saing produk - Belum terbentuknya Sinergi antar stake holder (Akademisi, Pelaku Usaha, Pemerintah dan Komunitas) untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang Kreatif - Potensi Produk unggulan Kota Makassar - Potensi Industri Kreatif Kota Makassar

12 Tabel 3.3.3 Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi selatan

Visi Dinas Perdagangan : "SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER" MISI		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter. 2. Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Berkelanjutan 		
	Permasalahan	Faktor

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
<p>4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Meningkatnya kinerja ekspor non migas</p> <p>6. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok</p> <p>7. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab</p>	<p>Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;</p> <p>2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;</p> <p>3. Daya saing produk rendah;</p> <p>4. Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas;</p> <p>5. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah</p>	<p>1. Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.</p> <p>2. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Sulawesi Selatan.</p>	<p>1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai</p> <p>3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi</p> <p>4. Tersedianya regulasi perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi</p>

13 Tabel 3.3.4 Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan

Visi Dinas Perindustrian : “SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”
MISI

1. Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel,
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi industri 2. Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industry 3. Meningkatkan kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi 4. Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berfungsinya secara optimal sistem informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industri, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah. 2. Keserasian dan sinergitas program antar perangkat pelaksana masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina. 3. Sistem pembelanjaan organisasi (learning organization) belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dengan bekerja (learning by doing). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing dan kualitas industri local 2. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industry 3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia industri 4. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkait Inovasi dan update teknologi industry 5. Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota 6. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan 7. Meningkatnya produk impor yang murah yang kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri

		<p>bersaing dengan produk lokal</p> <p>8. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.</p> <p>9. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.</p>	<p>terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha, khususnya IKM.</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi, khususnya IKM melalui kemitraan dengan perusahaan besar dan menengah</p>
--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Setrategis

Tujuan tata ruang kota makassar adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang ada Kawasan lindung dan Kawasan budaya.

Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan pengembangan perdagangan dan perindustrian yang harus selaras dengan pengembangan pembangunan di masa mendatang.

Faktor Penghambat berkaitan dengan pelayan Dinas perdagangan kaitannya dengan RT/RW yaitu :

5. Perda tata ruang wilayah belum dilaksanakan sevara maksimal,
6. Masih banyak pemberian izin uasah yang tidak memperhatikan perda tata ruang dan wilayah.
7. Banyaknya Usaha-usaha pergudangan yang masih melanggar Perada tata raung dan wilayah.
8. Jumlah SDM Penyidik yang belum memadai.

Faktor Pendorong :

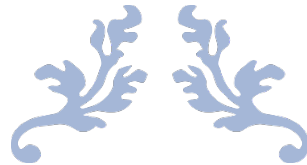
1. Koordinasi yang intensif dengan SKPD yang bertugas melakukan penegakan PERDA untuk penertiban usaha yang tidak sesuai dengan RT/RW.
2. Dukungan Walikota dan Kepolisian , Kejaksaan, dan KODIM untuk membantu penertiban.

3.5 Penentuan isu-isu setrategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu trategis Dinas Perdagangan Kota Makassar. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai berikut :

1. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
2. Masih Rendahnya SDM Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Makassar;
4. Rendahnya Kualitas produk ekspor dan kurangnya informasi mengenai prosedur ekspor;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan terjadinya gejolak harga serta masih beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal di Kota Maskassar.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Makassar mengacu pada

Dari ke-tiga (3) Misi tersebut terkandung beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam 5 tahun kedepan pada periode 2021- 2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi serta permasalahan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar dari sisi Perdagangan dan Perindustriannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

14Tabel 4.1 Tujuan Dan sasaran RPJMD 2021 – 2026

Misi 1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.1.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
			1.1.2 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
1.2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	1.2.1 Terwujudnya pelayanan publik yang <i>Sombere'</i> dan <i>Smart</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Misi 2

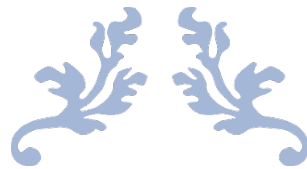
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indeks Kesehatan	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup
			2.1.2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan
2.2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi	2.2.1 Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
			2.2.2 Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Rasio Gini

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, dengan mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Perdagangan Kota Makassar beserta capaian target indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk lebih terperinci tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

15Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TASHUN KE -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia		Cakupan bina kelompok usaha industri dan perdagangan	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Jumlah kelompok Usaha Informal yang dibina	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
		Cakupan bina kelompok Pengrajin	27,70%	28,30%	28,90%	29,40%	30%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TASHUN KE -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor Perdagangan		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	20,46	21,86	22,86	23,86	24%
	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %
	Meningkatkan Kinerja Ekspor	Nilai bersih Eskpor	- 450.000.000 \$	- 350.000.000 \$	- 250.000.000 \$	- 150.000.000 \$	- 50.000.000 \$
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	52,69	55,7	56,9	57,3	58,0
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor industri pengolahan yang berkualitas		Kontribusi PDRB Sektor Industri	18,34 %	19,12 %	19,9 %	20,68 %	21,46 %
	Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	10,14 %	11,28 %	12,72%	15,16 %	16,49 %



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perdagangan Kota Tahun 2021-2026

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan- tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan- tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan organisasi.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Makassar yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran akan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Dan strategi juga merupakan kegiatan, mekanisme atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (Strenght, S) dengan peluang (Opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (Weakness,W) dengan peluang (Opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (Strenght, S) dengan ancaman (Threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Berdasarkan hasil Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan hasil Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yang telah diuraikan pada bab 2 diatas, maka masing-masing strategi pilihan tersebut harus di uji kembali relevansinya dan kekuatan relasinya dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi pemerintah yaitu Dinas Perdagangan Kota Makassar.

a. Strategi antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

- i. Lakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk memberikan kemudahan kepada investor dengan memanfaatkan letak geografis Kota Makassar yang strategis
- ii. Optimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) guna memberikan pelayanan tepat waktu dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan ketersediaan pusat perdagangan, pergudangan,

- kawasan dan zona industri untuk memenangkan persaingan global.
- iii. Berdayakan jumlah personil Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi dan peredaran barang khususnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dengan memanfaatkan sarana transportasi dan komunikasi secara optimal
 - iv. Manfaatkan teknologi sistem informasi Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk mempromosikan produk unggulan dan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan para investor
- b. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)
- i. Terapkan reward and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha dan investor dengan memberikan informasi yang jelas tentang letak geografis Kota Makassar sebagai daya tarik investasi
 - ii. Tingkatkan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dibidang Perdagangan dan Perindustrian untuk diaplikasikan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi yang kompetitif melalui pemanfaatan ketersediaan pusat perdagangan, pergudangan, kawasan dan zona industri
 - iii. Optimalkan sarana kerja yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan jasa transportasi dan komunikasi serta infrastruktur lainnya guna mendukung pelayanan dibidang Perdagangan dan Perindustrian
 - iv. Integrasikan pola kerja di internal secara sistemik untuk membangun koordinasi yang intensif dengan lembaga- lembaga bisnis baik yang ada di pemerintah maupun non pemerintah dalam mempromosikan dan memasarkan produk unggulan Kota Makassar.
 - v. Tingkatkan kompetensi aparatur Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan mengikutsertakan pada pelatihan teknis dan fasilitasi menambah wawasan dibidangnya masing-masing baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.
 - vi. Tingkatkan akurasi database dengan sistem informasi manajemen untuk memberikan informasi aktual yang mudah diakses dengan memanfaatkan hasil pengembangan teknologi
- c. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)
- i. Lakukan deregulasi untuk memberikan fasilitasi dan proteksi terhadap para pelaku usaha dan khususnya untuk produk yang berbasis lokal dalam menghadapi persaingan global
 - ii. Optimalkan standar operasional prosedur secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha untuk menghadapi persaingan dengan daerah lainnya.
 - iii. Dayagunakan aparatur secara efektif dalam mengendalikan penggunaan energi dan sumberdaya mineral untuk kebutuhan

industri dan kegiatan usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

- iv. Intensifkan teknologi sistem informasi Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk menjembatani kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan mempromosikan produk dalam negeri secara berkelanjutan guna menanamkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri

Hasil dari Analisis SWOT diatas strategi yang akan diambil oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dan kelembagaan Perdagangan dan Perindustrian
2. Memberikan Pelayanan prima kepada pelaku usaha dengan membuat kebijakan yang fleksibel dan mudah bagi investor dalam berusaha;
3. Penerapan teknologi tepat guna dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral yang proporsional;
4. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait untuk mewujudkan kawasan industri modern Berdasarkan analisis strategi dan pilihan tersebut sesuai

dengan ranking maka ditetapkan faktor kunci keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

- 1. Isu Strategi :** Pengembangan Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan jasa serta peningkatan iklim investasi, pajak dan redistribusi daerah.

2. Strategi S - O

- 2.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimum Dinas Perdagangan Kota Makassar didukung pemberdayaan aparatur Dinas Perdagangan Kota Makassar dan peningkatan fungsi lembaga penyelesaian konsumen.
- 2.2 Deregulasi dan debirokratisasi bidang Perdagangan dan Perindustrian disertai pemberdayaan kompetensi aparatur Dinas Perdagangan Kota Makassar.

3. Strategi S - T

- 3.1 Deregulasi fasilitasi dan proteksi bagi para pelaku usaha dengan mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten serta didukung BPSK yang proaktif
- 3.2 Pendayagunaan aparatur Dinas Perdagangan Kota Makassar secara efektif dan didukung penggunaan Sistem Informasi Dinas Perdagangan Kota Makassar secara intensif

4. Strategi W - O

- 4.1 Penguasaan peraturan perundang-undangan bidang Perdagangan dan bidang perindustrian guna menerapkan pola kerja yang sistemik

4.2 Peningkatan disiplin aparaturnya Dinas Perdagangan Kota Makassar agar mengoptimalkan sarana kerja yang ada serta tersedianya database yang mutakhir

5. Strategi W – T

5.1 Mengefektifkan koordinasi vertikal/horizontal dan menerapkan pelayanan prima

5.2 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparaturnya dan penegakan disiplin serta mengefektifkan monitoring dan evaluasi (MONEV)

16 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026

Visi: "Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Somber" dan "Smart City" dengan Imunitas Kota yang kuat untuk semua"			
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja dan pemuda dengan melibatkan dunia usaha.pemuda dengan melibatkan dunia usaha.	Pelaksanaan pelatihan keterampilan
			Optimalisasi jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta lembaga pelatihan kerja
Misi 2 :Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	2.2.1 Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan	Pengembangan ekonomi usaha rintisan (<i>startup</i>) yang berbasis Lorong

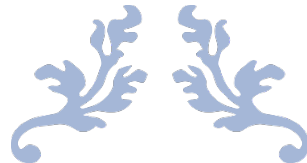
	2.2.2 Sasaran: Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Penguatan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar.	Fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil
--	---	--	--

Berdasarkan Analisis dan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan arah serta kebijakan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 maka untuk tujuan dan sasaran arah kebijakan Dinas Perdagangan Kota Makassar dapat di sajikan pada table 5. 2 Berikut :

17Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026

Visi : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang kuat untuk semua”			
Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor Perdagangan dengan melibatkan pelaku usha dan Lembaga pelatihan lainnya	Pelaksanaan Pelatihan keterampilan
Misi 2 : Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Peningkatan dan perluasan lapangan usaha sektor perdagangan	Pengembangan usaha informal berbasis instisan dari lorong
		Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan	Fasilitasi pelayan perizinan sektor perdagangan
		Peningkatan kualitas layanan pengelola sarana distribusi perdagangan	Pembangunan Pasar rakyat yang berSNI / Smart Pasar
			Palatihan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan

		Peningkatan Kuantitas Pelayanan kemetrolgian	Pelayanan Tera-tera ulang alat UTTP di tempat Usaha
		Pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting	Pemantauan harga kebutuhan pokok dan penting
			Operasi pasar
Meningkatkan Kinerja Ekspor		Perluasan Jaringan Ekspor non Migas	Promosi dan misi dagang ekspor
		Pengembangan dan peningkatan produk usaha ekspor	Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha ekspor
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah		Peningkatan Pelayanan Administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kesekretariatan
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya manusia
			Peningkatan Kualitas laporan Keuangan
			Peningkatan Sarana dan prasarana Kantor
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor industri pengolahan yang berkualitas	Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Penguatan aktivitas ekonomi terutama sektor industri	Pembinaan pelaku usaha industri kecil dan menengah
			Promosi dan peningkatan produksi produk kerajinan daerah
			fasilitasi perizinan Industri kecil dan menengah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Indikasi Kegiatan adalah indikasi tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang hendak dilaksanakan dan bersifat tidak kaku sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Adapun program dan indikasi kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Lima tahunan Dinas Perdagangan Kota Makassar, berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih diantaranya pada Misi ke 1,2, dan 3 yaitu :

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas Dunia Bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan yang kuat untuk semua
3. Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju Kota Nyaman kelas Dunia "Sombere dan Smart" City untuk semua.

Ke 3 (tiga) Misi ini, untuk Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan ini diharapkan menjadi pondasi perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan.

Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, adapun rencana program dan kegiatan tersebut tertuang dalam matrik dibawah ini :





Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan daya saing daerah Melalui Sektor Perdagangan			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	19.62 %	20.46	%	21.86 %	%	22.86 %	%	23.86 %	%	24 %	%	24 %		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengelola		Indeks Reformasi Birokrasi	52.695	52.69		55.7		56.9		57.3		58		58		



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
keuangan daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangka t Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	90	%	14.065.186.229	90	%	15.078.578.618	90	%	15.726.712.624	90	%	16.511.062.985	90	%	17.336.340.729	90%	Dinas Perdagangan	
				90%	90	%		90	%		90	%		90	%		90	%		60%		



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%		
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%	90%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat	8	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dinas Perdagangan	
						148.666.000		156.094.000		163.859.900		171.988.000		180.480.000			



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			Daerah yang berkualitas																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	2	Dokumen	90.670.000	2	Dokumen	95.200.000	2	Dokumen	99.960.000	2	Dokumen	104.900.000	2	Dokumen	110.145.000	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1	1	Dokumen	10.638.000	1	Dokumen	11.169.000	1	Dokumen	11.700.000	1	Dokumen	12.285.000	1	Dokumen	12.800.000	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	1	Dokumen	10.160.000	1	Dokumen	10.668.000	1	Dokumen	11.200.000	1	Dokumen	11.760.000	1	Dokumen	12.348.000	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	1	Dokumen	8.425.000	1	Dokumen	8.846.000	1	Dokumen	9.288.000	1	Dokumen	9.750.000	1	Dokumen	10.230.000	DINAS PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	1	Dokumen	9.569.000	1	Dokumen	10.047.000	1	Dokumen	10.540.000	1	Dokumen	11.067.000	1	Dokumen	11.620.000	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKiJP yang disusun	1	1	Dokumen	10.303.000	1	Dokumen	10.818.000	1	Dokumen	11.358.900	1	Dokumen	11.926.000	1	Dokumen	12.522.000	DINAS PERDAGANGAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	1	1	Dokumen	8.901.000	1	Dokumen	9.346.000	1	Dokumen	9.813.000	1	Dokumen	10.300.000	1	Dokumen	10.815.000	DINAS PERDAGANGAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	216	416	Dokumen	12.602.230.379	426	Dokumen	13.236.022.158	413	Dokumen	13.897.820.016	460	Dokumen	14.592.683.202	481	Dokumen	15.322.316.312	Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	DINAS PERDAGANGAN	
						12.119.591.579		12.725.571.157,95		13.361.849.715,85		14.029.942.201,64		14.731.439.311,72			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12	12	Bulan	410	Dokumen	425	Dokumen	450	Dokumen	475	Dokumen	475	DINAS PERDAGANGAN	
						346.080.000		363.384.000,00		381.550.000,00		400.600.000,00		420.630.000,00			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	4	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	DINAS PERDAGANGAN	
						-		3.681.000,00		3.865.000,00		4.058.000,00		4.260.000,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	DINAS PERDAGANGAN	
						136.558.800		143.386.000,00		150.555.300,00		158.083.000,00		165.987.000,00			



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	8		Dokumen	8	Dokumen	2.339.000	8	Dokumen	2.455.000	8	Dokumen	2.577.000	8	Dokumen	2.705.000	Dinas Perdagangan	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	2		Dokumen	2	Dokumen	2.339.000,00	2	Dokumen	2.455.000,00	2	Dokumen	2.577.000,00	2	Dokumen	2.705.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan administrasi kepegawaian	90%	90	%	90	%	257.749.000	90	%	270.635.500	90	%	284.157.000	90	%	298.354.900	Dinas Perdagangan	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	74	93	psg	85.350.000	93	psg	89.650.000,00	93	psg	94.132.500,00	93	psg	98.830.000,00	103.770.000,00	93	DINAS PERDAGANGAN	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	12	12	bulan	50.094.600	12	bulan	52.599.000,00	12	bulan	55.228.000,00	12	bulan	57.989.000,00	60.880.000,00	12	DINAS PERDAGANGAN	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	0	4	orang	110.000.000	4	orang	115.500.000,00	4	orang	121.275.000,00	4	orang	127.338.000,00	133.704.900,00	20	DINAS PERDAGANGAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180	90	90	%	164.189.000	90	%	172.811.900	90	%	180.702.000	90	%	188.786.000	198.070.000	90	Dinas Perdagangan	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	9	9	jens	4.578.000	9	jens	4.806.900	9	jens	5.047.000	9	jens	5.299.000	9	jens	5.560.000	DINAS PERDAGANGAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	3	Jenis	33.814.000	3	Jenis	35.505.000	3	Jenis	37.280.000	3	Jenis	39.144.000	3	Jenis	41.100.000	DINAS PERDAGANGAN	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya bahan peralatan rumah tangga	12	0			12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		DINAS PERDAGANGAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	547	Ksemplar	11.797.000	550	Eksemplar	12.300.000	600	Eksemplar	12.915.000	625	Eksemplar	13.560.000	650	Eksemplar	14.238.000	DINAS PERDAGANGAN	Kota X



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia	7	7 jenis	24.000.000	7 jenis	25.200.000	7 jenis	26.460.000	7 jenis	27.783.000	7 jenis	29.172.000	7	DINAS PERDAGANGAN	Kota X
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	8	8 kali	90.000.000	9 kali	95.000.000	10 kali	99.000.000	11 kali	103.000.000	12 kali	108.000.000	50	DINAS PERDAGANGAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia	90%	90%	6.500.000	90%	225.500.000	90%	131.775.000	90%	137.435.000	90%	144.306.750	90%	Dinas Perdagangan	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1	1 unit	.	1 unit usaha	1	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang di adakan	33	3	unit motor	1	unit mobil	1	Unit Mobil Pelayanan Tera	4	unit motor	4	unit motor	46	DINAS PERDAGANGAN	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di sediakan		Jenis		2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	8	DINAS PERDAGANGAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		Jenis		4	Jenis	5	Jenis	6	Jenis	5	Jenis	22	DINAS PERDAGANGAN	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan		unit		1	unit		unit		unit		unit	1	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	%	384.549.000	100	%	403.774.960	100	%	423.963.708	100	%	445.161.183	100	%	467.419.143	100%	Dinas Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	12	12	bulan	122.074.800	12	bulan	128.178.000	12	bulan	134.586.900	12	bulan	141.316.000	12	bulan	148.381.800	12	DINAS PERDAGANGAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	bulan	162.715.200	12	bulan	170.850.960	12	bulan	179.393.508	12	bulan	188.363.183	12	bulan	197.781.343	12	DINAS PERDAGANGAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	12	bulan	99.759.000	12	bulan	104.746.000	12	bulan	109.983.300	12	bulan	115.482.000	12	bulan	121.256.000	12	DINAS PERDAGANGAN	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Bulan	513.607.250	12	Bulan	624.287.600	12	Bulan	655.501.500	12	Bulan	688.275.600	12	Bulan	722.688.625	Dinas Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	12	12	Bulan	34.956.100	12	Bulan	36.703.900	12	Bulan	38.539.000	12	Bulan	40.465.000	12	Bulan	42.488.000	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	30	30	unit	424.831.150	30	unit	446.072.700	30	unit	468.376.000	30	unit	491.794.800	516.384.500	30	DINAS PERDAGANGAN	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	41	41	unit	53.820.000	45	unit	56.511.000	47	unit	59.336.500	53	unit	62.303.300	65.418.000	55	DINAS PERDAGANGAN	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	1	unit	.	1	unit	.	1	unit	.	1	unit	.	.	1	DINAS PERDAGANGAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	unit	.	1	unit	86.000.000	1	unit	89.250.000	1	unit	93.712.500	98.398.125	1	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan daya saing daerah Melalui Sektor Perdagangan			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	19,62 %	20,46 %		21,86 %		22,86 %		23,86 %		24 %		24 %		
	Meningkatnya usaha perdagangan		Pertumbuhan usaha perdagangan		3,76 %		3,76 %		3,76 %		3,76 %		3,76 %		18,8 %		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	38,23 % (5077 dari 13.277 usaha)	45 %		50 %		65 %		75 %		95 %		95 %	Dinas Perdagangan	
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin		340 izin		340 izin		340 izin		340 izin		340 izin		340	Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Usaha Toko Swalayan														
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan		340	Unit	340	Unit	340	Unit	340	Unit	340	Unit	340	DINAS PERDAGANGAN	
						38.757.000		40.690.000		42.700.000		44.860.000		47.100.000			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang terbit		440	unit	165.509.800	440	unit	169.280.000	440	unit	180.008.000	440	unit	198.097.000	225.000.971	440	Dinas Perdagangan	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan		440	Unit	165.509.800	440	Unit	169.280.000	440	Unit	180.008.000	440	Unit	198.097.000	225.000.971	440	DINAS PERDAGANGAN	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit		460	Unit	21.193.000	460	Unit	22.500.000	460	Unit	23.365.000	460	Unit	24.530.000	25.760.000	460	Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendalikan		460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	DINAS PERDAGANGAN	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit		110	unit	110	unit	110	unit	110	unit	110	unit	110	Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan		110	Unit	110	Unit	123.840.000	110	Unit	130.000.000	110	Unit	136.500.000	143.300.000	110	DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	0	0	Pasar	1	Pasar	500.000.000	1	Pasar	527.732.000	1	Pasar	566.903.000	619.068.000	4	Dinas Perdagangan
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan	0	55,55	%		%	83,33		%	100	%			100%		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik		1	Pasar	1	pasar	461.226.000	1	pasar	487.020.000	1	pasar	524.155.400	619.068.000	4 pasar	Dinas Perdagangan
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	0	1	Pasar	1	Pasar	461.226.000	1	Pasar	487.020.000	1	Pasar	524.155.400	619.068.000	4 pasar	DINAS PERDAGANGAN
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	0			100	Orang	38.774.000	100	Orang	40.712.000			42.747.600		300 orang	DINAS PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	0		100	Orang	38.774.000	100	Orang	40.712.000		Orang	42.747.600		300 orang	DINAS PERDAGANGAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	26%	33,3 %	33,3 %		365.905.000	33,3 %		386.200.000	33,3 %		414.865.000	33,3 %		Dinas Perdagangan	
			Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	16%	18 %	18 %			18 %		18 %		18 %	18 %				
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terkendali	11 jenis	4 Jenis	4 Jenis		365.905.000	4 Jenis	Jenis	386.200.000	4 Jenis	Jenis	414.865.000	4 Jenis		Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Kabupaten/Kota															
		Jumlah jenis barang penting yang terkendali	7 Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang di pantau dan pasar murah	10 pasar	10 pasar	10 pasar	10 pasar	57.155.000	10 pasar	60.000.000	10 pasar	63.000.000	10 pasar	66.100.000	10 Pasar	DINAS PERDAGANGAN	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan			Kali	15	Kali	308.750.000	15	Kali	326.200.000	15	Kali	351.865.000	15	Kali	386.940.000	15 kali	DINAS PERDAGANGAN	
	Meningkatkan Kinerja Ekspor		Nilai Ekspor bersih	(377,777,000) US\$	(450,000,000) US\$	\$	(350,000,000) US\$	\$	(250,000,000) US\$	\$	(150,000,000) US\$	\$	(50,000,000) US\$	\$	(50,000,000) US\$						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor	373.090.000 US\$	402.937.200	\$	463.377.780	\$	473.526.000	\$	579.222.225	\$	499.790.000	\$	536.886.000	905.034.726	\$	586.290.000	US\$ 905.034.726	Dinas Perdagangan	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	Jenis komoditas unggulan yang diekspor		10	Jenis	10	Jenis	456.378.900	10	Jenis	473.526.000	10	Jenis	499.790.000	10	Jenis	536.886.000	10 Jenis	Dinas Perdagangan	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Kabupaten/Kota															
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan		50	Usaha	75	Usaha	81.905.505	75	Usaha	75	Usaha	90.300.000	350	DINAS PERDAGANGAN	
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti		2	pameran	2	pameran	125.871.800	2	pameran	2	pameran	160.449.771		DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan		2	pameran 76.963.000	2	pameran 76.963.000	2	pameran 78.000.000	2	pameran 78.000.000	2	pameran 80.000.000		DINAS PERDAGANGAN	
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pameran Misi Dagang yang dilaksanakan		1	pameran .	1	pameran .	1	pameran .	1	pameran .	1	pameran .		DINAS PERDAGANGAN	
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan		25	produk .	25	produk .	25	produk .	25	produk .	25	produk .		DINAS PERDAGANGAN	
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibangun		20	usaha 179.795.900	20	usaha 188.785.695	20	usaha 198.224.980	20	usaha 208.136.229	20	usaha 218.543.040		DINAS PERDAGANGAN	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Usaha Perdagangan			Pertumbuhan usaha perdagangan		3,76 %	%	3,76 %	%	3,76 %	%	3,76 %	%	3,76 %	%	18,8 %		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	31,25 % (625 dari 2000 Uttp)	35	%	45	%	70	%	80	%	100	%	100%	Dinas Perdagangan		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah alat Uttp yang di tera		700	Uttp	900	Uttp	1400	Uttp	1600	Uttp	2000	Uttp	2000 Uttp	Dinas Perdagangan		



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTTP yang dilayani di tempat pelaku usaha		700	UTTP	900	UTTP	1400	UTTP	1600	UTTP	2000	UTTP	2000	UTTP	DINAS PERDAGANGAN	
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi		700	UTTP	900	UTTP	1400	UTTP	1600	UTTP	2000	UTTP	2000	UTTP	DINAS PERDAGANGAN	
Meningkatkan sumber daya manusia			Cakupan bina kelompok usaha industri dan perdagangan		27,27	%	27,27	%	27,27	%	27,27	%	27,27	%	27,27	%		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia sektor industri dan perdagangan			Persentase Jumlah kelompok Usaha Informal yang dibina		12 .5 %	%	12 .5 %	%	12 .5 %	%	12 .5 %	%	1 2.5 %	%	6 2.5 %					
			Cakupan bina kelompok Pengrajin	27,70%	27,27	%	28 ,30%	%	28 .9 %	%	29 .4 %	%	3 0%	%	3 0%					
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	400	500	klp	511.572.000	500	klp	530.791.760	500	klp	560.234.779	500	klp	601.821.007	500	klp	657.200.576	2000	Dinas Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan		1	pameran	511.572.000	1	pameran	530.791.760	1	pameran	560.234.779	1	pameran	601.821.007	1	pameran	657.200.576	5 pameran	Dinas Perdagangan



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan		1	Pameran	1	Pameran	189.621.105	1	Pameran	200.139.388	1	Pameran	214.995.735	1	Pameran	234.779.642	5 pameran	DINAS PERDAGANGAN	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang /usaha informal yang dibina	400	500	klp	500	klp	220.483.625	500	klp	232.713.852	500	klp	249.988.201	500	klp	272.992.115	2000 klp	DINAS PERDAGANGAN	
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang di buat		1	buah	1	buah	120.687.030	1	buah	127.381.539	1	buah	136.837.071	1	buah	149.428.818	1 buah	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1215 data hasil monev	1315	unit usaha	1415	unit usaha	1515	unit usaha	1615	unit usaha	1715	unit usaha	1715 unit usaha	Dinas Perdagangan	
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0	0	%	10	%	20	%	40	%	60	%	80	%	
			Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	0	350	orang	350	orang	350	orang	350	orang	350	orang	1750		



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pengrajin yang dibina		350	Orang	2.107.705.471	350	Orang	2.186.891.966	350	Orang	2.308.198.863	350	Orang	2.479.513.382	2.707.678.204	1750	Dinas Perdagangan	
			Jumlah IKM Lorong Wisata yang dibina		75	Irg		75	Irg		75	Irg		75	Irg			375		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Peningkatan dan Pengembangan Industri Daerah	12	4	pameran	546.887.000	4	pameran	567.433.545	4	pameran	598.909.083	4	pameran	643.360.115	702.562.113	20 pameran	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/mengah yang diikuti	3	2	pameran	145.720.000	2	pameran	151.194.700	2	pameran	159.581.470	2	pameran	171.423.607	187.200.192	10 pameran	DINAS PERDAGANGAN	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Waktu operasional UPTD	12	12	bulan	569.916.471	12	bulan	591.328.233	12	bulan	624.129.210	12	bulan	670.452.080	12	bulan	732.147.080	12 bulan	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina		350	Orang	845.182.000	350	Orang	876.935.488	350	Orang	925.579.099	350	Orang	994.275.580	350	Orang	1.085.768.819	1250 orang	DINAS PERDAGANGAN	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			Kontribusi PDRB Sektor Industri	17.90 %	18.34 %	%		19.2 %	%		19.9 %	%		20.68 %	%		21.46 %	%		2 1.46 %		
	Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan		Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	0 %	10.14 %	%		11.28 %	%		12.72 %	%		15.16 %	%		16.49 %	%		1 6.49 %		



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Melalui industri pengolahan yang berkualitas	menengah	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	(65 izin yang keluar dari 106 pemohon)	50	%	75	%	85	%	95	%	100	%	100%	Dinas Perdagangan	Kota X
						344.143.800		357.073.283		376.880.138		404.855.950		442.110.795			
			Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	300		350	klp	350	klp	400	klp	400	klp	450	klp	2250	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau		360	IKM	344.143.800	360	IKM	357.073.283	360	IKM	376.880.138	360	IKM	404.855.950	360	IKM	442.110.795	1440 IKM	Dinas Perdagangan	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah IKM yang mendapatkan edukasi		200	IKM	69.726.200	200	IKM	72.345.813	200	IKM	76.358.836	200	IKM	82.026.952	200	IKM	89.575.072	1000 IKM	DINAS PERDAGANGAN	



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		(SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM		360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM	1440 IKM	DINAS PERDAGANGAN	
						274.417.600		284.727.469		300.521.302		322.828.998		352.535.723			



DISDAG
KOTA MAKASSAR
Tahun 2024

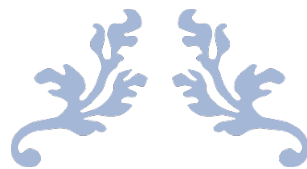
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	0	100	%	137.348.000	100	%	71.254.082	100	%	75.206.546	100	%	80.789.128	100	%	88.223.344	100	Dinas Perdagangan	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi industri		100	%	137.348.000	100	%	71.254.082	100	%	75.206.546	100	%	80.789.128	100	%	88.223.344	100%	Dinas Perdagangan	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		DISDAG KOTA MAKASSAR Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM		100	IKM	68.674.000	100	IKM	.	100	IKM	.	100	IKM	.	500 IKM	DINAS PERDAGANGAN			
		Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Terpenuhinya data kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian				68.674.000	200	IKM	71.254.082	200	IKM	75.206.546	200	IKM	80.789.128	200	IKM	88.223.344	DINAS PERDAGANGAN	



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondi si Kinerj a pada Akhir Period e Renstr a PD	Unit kerja PD penggun g jawab	Loka si dan Kelo mpok Sasar an	
					Target	R p	Target	R p	Target	R p	Target	R p	Target	R p				
			ian Data ke SIINas															
Jumlah Total						18.251.174.000			20.157.183.868			21.097.566.424			22.287.275.775			23.646.364.173



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan

rencana kerja pemerintah daerah bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Perdagangan Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan di bidang Perdagangan dan di bidang perindustrian berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan serta mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar yang baru saja ditetapkan, Maka indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 7.1 (IKU) dan Tabel 7.2 berikut ini.

19 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Makassar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TASHUN KE -				
		1	2	3	4	5
1	Cakupan bina kelompok usaha industri dan perdagangan	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27%
1	Persentase Jumlah kelompok Usaha Informal yang dibina	12,50%	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
2	Cakupan bina kelompok Pengrajin	27,7	28,3	28,9	29,4	30,0
2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	20,46	21,86	22,86	23,86	24%
1	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %
2	Nilai bersih Eskpor	- 450.000.000 \$	- 350.000.000 \$	- 250.000.000 \$	- 150.000.000 \$	- 50.000.000 \$
3	Indeks Reformasi Birokrasi	52,69	55,7	56,9	57,3	58,0
7	Kontribusi PDRB Sektor Industri	18,34 %	19,12 %	19,9 %	20,68 %	21,46 %
1	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	10,14 %	11,28 %	12,72%	15,16 %	16,49 %

20Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	8	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Jumlah Dokumen LAKIJP yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	216	416	Dokumen	426	Dokumen	413	Dokumen	460	Dokumen	481	Dokumen
	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12	12	Bulan	410	Dokumen	425	Dokumen	450	Dokumen	475	Dokumen
	Jumlah dokumen akuntansi	4	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen
	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen
	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	8	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	2	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
	Prosentase Penyediaan administrasi kepegawaian	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%
	Jumlah pakaian dinas	74	93	psg	93	psg	93	psg	93	psg	93	psg
	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	12	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	0	2	orang	2	orang	2	orang	2	orang	2	orang
	Persentase pelayanan administrasi umum	90	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	9	9	jens	9	jens	9	jens	9	jens	9	jens
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	tersedianya bahan peraltan rumah tangga	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia	7	7	jenis	7	jenis	7	jenis	7	jenis	7	jenis
	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	8	8	kali	9	kali	10	kali	11	kali	12	kali
	Persentase sarana penunjang yang tersedia	90%	90	%	90	%	90	%	90	%	90	%
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di adakan	1	1	unit	1	unit	usaha					
	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang di adakan	33	3	unit motor	1	unit mobil	1	Unit Mobil Pelayanan Tera	4	unit motor	4	unit motor
	Jumlah mebel yang di sediakan		2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis
	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		3	Jenis	4	Jenis	5	Jenis	6	Jenis	5	Jenis
	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan		1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	12	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	12	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	30	30	unit	30	unit	30	unit	30	unit	30	unit
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	41	41	unit	45	unit	47	unit	53	unit	55	unit
	Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit
	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	38,23 % (5077 dari 13.277 usaha)	45	%	50	%	65		75		95	
	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		340	izin	340	izin	340	izin	340	izin	340	izin

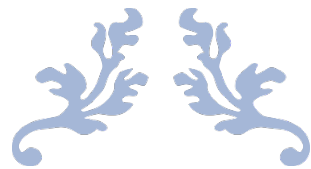
No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit
	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan		340	Unit	340	Unit	340	Unit	340	Unit	340	Unit
	Jumlah tada daftar gudang yang terbit		440	unit	440	unit	440	unit	440	unit	440	unit
	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan		440	Unit	440	Unit	440	Unit	440	Unit	440	Unit
	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit		460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit
	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendaliak		460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit	460	Unit
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit		110	unit	110	unit	110	unit	110	unit	110	unit
	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan		110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit
	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	0	0	Pasar	1	Pasar	1	Pasar	1	Pasar	1	Pasar
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan	0	55,5 5	%	83,3 3	%	100	%				
	Jumlah Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik		1	pasar	1	pasar	1	pasar	1	pasar	1	pasar

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	0	1	pasar	1	Pasar	1	Pasar	1	Pasar	1	Pasar
	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	0	100	Orang	100	Orang	100	Orang				
	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	0	100	Orang	100	Orang	100	Orang				
	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	26%	33,3	%	33,3	%	33,3	%	33,3	%	33,3	%
	Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	16%	18	%	18	%	18	%	18	%	18	%
	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terendali	11 jenis	11	Jenis	11	Jenis	11	Jenis	11	Jenis	11	Jenis
	Jumlah pasar yang di pantau dan pasar murah	10 pasar	10	pasar	10	pasar	10	pasar	10	pasar	10	pasar
	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan		15	Kali	15	Kali	15	Kali	15	Kali	15	Kali
	Peningkatan Nilai ekspor	373.090.000 US\$	402.937.200	\$	463.377.780	\$	579.222.225	\$	724.027.781	\$	905.034.726	\$
	Jumlah promosi dagang yang dilaksanakan dan diikuti		5	Pameran	5	Pameran	5	Pameran	5	Pameran	5	Pameran
	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan		200	Usaha	200	Usaha	200	Usaha	200	Usaha	200	Usaha
	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti		2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan		2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran
	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang dilaksanakan		1	pameran	1	pameran	1	pameran	1	pameran	1	pameran
	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan		25	produk	25	produk	25	produk	25	produk	25	produk
	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di bina		20	usaha	20	usaha	20	usaha	20	usaha	20	usaha
	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	31,25 % (625 dari 2000 Uttp)	35	%	45	%	70	%	80	%	100	%
	jumlah alat Uttp yang di tera		700	Uttp	006	Uttp	1400	Uttp	1600	Uttp	2000	Uttp
	Jumlah alat Uttp yang dilayani dikantor Jumlah alat Uttp yang dilayani di tempat pelaku usaha		700	Uttp	006	Uttp	1400	Uttp	1600	Uttp	2000	Uttp
	Jumlah alat Uttp yang di awasi		700	Uttp	006	Uttp	1400	Uttp	1600	Uttp	2000	Uttp
	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	400	500	klp	005	klp	500	klp	500	klp	500	klp
	Jenis Komoditas unggulan yang diekspor		10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis
	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan		1	Pameran	1	Pameran	1	Pameran	1	Pameran	1	Pameran
	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	400	500	klp	500	klp	500	klp	500	klp	500	klp

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang di buat		1	buah	1	buah	1	buah	1	buah	1	buah
	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1215 data hasil money	1315	unit usaha	1415	unit usaha	1515	unit usaha	1615	unit usaha	1715	unit usaha
	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0	0	%	10	%	20	%	40	%	60	%
	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	0	350	orang	350	orang	350	orang	350	orang	350	orang
	Jumlah pengrajin yang dibina		350	Orang	350	Orang	350	Orang	350	Orang	350	Orang
	Jumlah IKM Lorong Wisata yang di bina		75	Irg	75	Irg	75	Irg	75	Irg	75	Irg
	Peningkatan dan Pengembangan Industri Daerah	12	4	pameran	4	pameran	4	pameran	4	pameran	4	pameran
	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	3	2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran	2	pameran
	Waktu operasional UPTD	12	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan
	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina		350	Orang	350	Orang	350	Orang	350	Orang	350	Orang

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun									
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
			Target		Target		Target		Target		Target	
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	(65 izin yang keluar dari 106 pemohon)	50	%	75	%	85	%	95	%	100	%
	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	300	350	klp	350	klp	400	klp	400	klp	450	klp
	Jumlah usaha ikm yang di pantau		360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM
	Jumlah IKM yang mendapatkan edukasi		200	IKM	200	IKM	200	IKM	200	IKM	200	IKM
	Jumlah data IKM		360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM	360	IKM
	Pesentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	0	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Tersedianya data informasi industri		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM		100	IKM	100	IKM	100	IKM	100	IKM	100	IKM
	Terpenuhinya data kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas				200	IKM	200	IKM	200	IKM	200	IKM



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Tahun 2021 - 2026 akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor termasuk yang berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi Walikota Makassar yang telah dicanangkan.

Dengan selesainya disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026, Maka ini menjadi pedoman dalam penyiapan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 - 2026, diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memiliki arah kebijakan yang jelas untuk memajukan perekonomian Kota Makassar pada bidang Perdagangan dan di bidang Peindustrian.

Dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak terkait, mulai dari semua unsur tim, staf dan pejabat struktural, serta fungsional. Semoga apa yang telah dirumuskan dalam Rencana strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar ini, dapat diaplikasikan dengan baik.

Akhirnya, kami berharap agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Makassar, September 2021

Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Kota Makassar

ARLIN ARIESTA S.STP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19770411 199511 1 002